

**RELOKASI WARGA PASCA ERUPSI MERAPI 2010
(Studi Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI



Oleh:

ILHAM ADHA INDRADEKA

NIM. 08172397/ P

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kebaruan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kajian Pustaka	8
1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi	8
2. Kebijakan Relokasi Permukiman dari Kawasan Rawan Bencana	13
3. Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Di Kawasan Bencana	17
4. Pendekatan-Pendekatan Keprilakuan (<i>Behaviour Approaches</i>)...	18
B. Kerangka Pemikiran	24
	vii

III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis Data dan Sumber Data	27
1. Data Primer	27
2. Data Sekunder	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Wawancara	28
2. Studi Dokumen	28
E. Teknik Analisis Data	28
IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA BALERANTE	
A. Letak Geografis	30
B. Penggunaan Tanah	33
C. Kependudukan	35
D. Pendidikan	37
E. Mata Pencaharian	37
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Yang Menjadi Hambatan Terhadap Rencana Relokasi	39
1. Faktor <i>Intern</i>	45
a) Ekonomi (Luas Tanah)	45
b) Kedudukan dan Tanggungjawab	48
c) Sosial Masyarakat	49
d) Lingkungan Pegunungan.....	50
e) Sejarah (<i>Historis</i>).....	52
f) Kepemilikan	53
g) Ketidakpercayaan Kepada Kebijakan Pemerintah (Tempat Di Dusun Tegalweru)	55
h) Jarak Lokasi.....	56
i) Adat Istiadat <i>Pekewoh</i>	58

2. Faktor <i>Extern</i>	59
a) Penguasa/Pemerintah	59
b) Peraturan Perundang-Undangan	61
c) Dukungan Pemerintah.....	62
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Dalam Menanggulangi Permasalahan Relokasi	63
1. Meminimalisasi Kehilangan Sejarah (<i>Historis</i>), Kepemilikan Dan Ekonomi	75
2. Meminimalisasi Ketidak Percayaan Terhadap Pemerintah (Tempat Relokasi Di Dusun Tegalweru) Dan Penguasa/Pemerintah	79
3. Meminimalisasi Jarak Lokasi	80
4. Menyelaraskan Peraturan Perundang-Undangan	82
5. Menata Lingkungan Pegunungan	83
VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
Daftar Pustaka	88
Lampiran	

ABSTRACT

On October 26, 2010, the eruption of Merapi occurred which resulted in loss of life, property, environmental and village settlements on the slopes of the Mount of Merapi. One location is the Village of Balerante as the only village as most affected in the Regency of Klaten. The occurred eruption of Merapi was damaging seven hamlets in the Village of Balerante. In response, the Regency Government of Klaten issued a policy of relocation plan. Citizen response to the relocation plan is refused. Faced on the above problems, this study is aimed to (1) understand some factors that become barriers to the relocation plan, (2) understand some efforts of the Government and the Land Office of the Regency of Klaten in handling the problems that occur in relocation.

In this study, researcher used descriptive research method with qualitative approach. Data collection techniques consisted of (1) interviews, which are conducted using an interview guide to the Disaster Management Agency of the Regency of Klaten, the District Land Office of Klaten, the Development Agency of the Regency of Klaten, Apparatus of the Village of Balerante and the Village Community of Balerante who refused relocation, (2) study document, which conducted on some related documents, maps and a list of disaster legislation, and (3) observations, carried out through direct observation in the field which results in photo documentation of the relocation plan.

Based on the research results, some factors that become an obstacle to the planned relocation consist of internal and external factors. The internal factors includes (1) Economics (Land), (2) Position and Responsibilities, (3) Social Community (4) Environmental Mountains, (5) History (Historical), (6) Ownership, (7) Mistrust to Government Policy (Relocation Place in the Hamlet of Tegalweru), (8) Distance Location, (9) Customs of *Pekewoh*. The external factors includes (1) Authority/Government, (2) Regulations/Legislation, (3) Government Supports. Some Efforts which implemeted by the Local Government and Regency Land Office of Klaten in handling the problems of relocation, namely (1) Minimize the Loss of Ownership and Economics, (2) Minimize the Distrust of Government Policy (Site Relocation in the Hamlet of Tegalweru) and Authority/Government, (3) Minimize the Distance Location, (4) Aligning the Regulation/Legislation, and (5) Reforming the Environmental Mountains.

Key words: relocation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 26 Oktober 2010, terjadi erupsi Merapi yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta benda, permukiman dan lingkungan warga desa di lereng Gunung Merapi.¹ Tercatat jumlah desa yang terkena dampak erupsi Merapi berjumlah 57 desa yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di empat Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta. Empat kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, sedangkan di Kabupaten Klaten hanya Desa Balerante yang terkena dampak paling besar diantara tiga desa di Kecamatan Kemalang yang berbatasan langsung dengan Gunung Merapi.²

Akibat erupsi Merapi merusak tujuh pedukuhan di Desa Balerante. Perdukuhan tersebut yaitu, Dukuh Sambungrejo, Ngipiksari, Gondang, Karangrejo, Sukorejo, Ngelo, dan Banjarsari. Di dukuh tersebut sebagian besar masih tertutupi material vulkanik hingga empat sampai lima kilometer

¹ Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato (krucut), dengan ketinggian 2.980 meter di atas permukaan laut. Erupsi ini merupakan yang terbesar di bandingkan dengan bencana serupa pada lima kejadian sebelumnya, yaitu kejadian pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. (Berdasarkan data Pusdalops BNPB pertanggal 12 Desember 2010). BAPPENAS – BNPB. 2011. *Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi DI. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah*. Halaman i.

² Tiga desa yang berbatasan langsung dengan Gunung Merapi adalah Desa Balerante, Desa Sidorejo dan Desa Tegalmulyo, semuanya masuk ke dalam Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Peta Lokasi dan Jumlah Pengungsi Letusan G.Api Merapi di Kab. Klaten – Geospasial BNPB <http://geospasial.bnpb.go.id/2010/11/03/peta-lokasi-dan-jumlah-pengungsi-letusan-g-api-merapi-di-kab-sleman-3/> diunduh pada tanggal 17 Desember 2011 pada pukul 2.44 WIB.

dari puncak Merapi, sehingga terlihat hamparan abu vulkanik, rumah roboh, pohon dan tanaman mengering.³

Berdasarkan Pasal 28H huruf (1) UUD 1945⁴ bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, merupakan tanggung jawab negara sebagai pusat pemerintahan. Menurut Pasal 4, 5, 53 dan 54 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Pemerintah berkewajiban memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, meliputi sandang, pangan, pelayanan kesehatan pada hunian sementara serta masyarakat yang terkena bencana di tempatkan pada lokasi yang aman.

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meliputi bantuan penyediaan : (a) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (b) pangan; (c) sandang; (d) pelayanan kesehatan; (e) pelayanan psikososial; dan (f) penampungan serta tempat hunian dan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

³ Abu Vulkanik Tenggelamkan Enam Dukuh Di Balerante Klaten - Klatenkita.com. http://klatenkita.com/72_Abu-Vulkanik-Tenggelamkan-Enam-Dukuh-Di-Balerante-Klaten.html diunduh pada tanggal 21 Januari 2012 pada pukul 22.52 WIB.

⁴ Perubahan II tanggal 18 Agustus 2000.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia yang berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Disini Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mempunyai kewenangan dalam melindungi warganya yang terkena bencana erupsi Merapi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mempunyai inisiatif untuk melakukan rencana relokasi permukiman bagi warga Desa Balerante ke Dusun Tegalweru, karena mengingat bahaya erupsi Merapi dapat mengancam sewaktu-waktu, tetapi mendapatkan penolakan dari warga Desa Balerante karena lokasi permukiman yang baru jauh dari rumah yang lama dan tanah garapan semula, sehingga biaya hidup menjadi tinggi.⁵ Masyarakat Desa Balerante juga merasa resah tentang adanya berita mengenai pengambilalihan lahan warga masyarakat yang mengikuti relokasi oleh pemerintah daerah yang nantinya lahan tersebut akan dijadikan hutan lindung.⁶

⁵ Warga-Menolak-Program-Batal-Relokasi-Kembali-ke-Tegalweru <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/14/192582/Jika-> diunduh pada tanggal 11 Desember 2011 pada pukul 9.35 WIB.

⁶ Warga Merapi Digemparkan Isu Pengambilalihan Lahan - Timlo. Net <http://sosial.timlo.net/baca/8756/warga-merapi-digemparkan-isu-pengambilalihan-lahan> diunduh pada tanggal 11 Desember 2011 pada pukul 9.41 WIB.

Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten lokasi yang diinginkan masyarakat tidak sesuai dengan tata ruang dan belum mendapatkan rekomendasi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian (BPPTK) Yogyakarta. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya relokasi demi keselamatan warga masyarakat dan juga menambahkan bantuan berupa satu ekor sapi tiap kepala keluarga.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan KBPN No. 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana, yang mengatakan bahwa BPN RI turut serta dalam penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana. Dimana instansi yang mengurus masalah pertanahan ini berkewajiban mengembalikan hak-hak masyarakat yaitu pemulihan data fisik dan yuridis yang menyangkut sertipikat hak atas tanah dan arsip berlaku sebagai dokumen pertanahan, sehingga permasalahan mengenai pengambilan tanah yang dipermasalahkan dapat dihindari.

Berdasarkan permasalahan di atas, terkait penolakan warga dalam rencana relokasi dan belum jelasnya lokasi yang diijinkan untuk lokasi permukiman, maka peneliti tertarik mengambil judul “**Relokasi Warga Pasca Erupsi Merapi 2010 (Studi Di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)**”.

⁷ Kedaulatan Rakyat Dijanjikan Bantuan Sapi Warga Tetap Tolak Relokasi Selasa Wage 31 Januari 2012. Halaman 14.

B. Rumusan Masalah

Erupsi Merapi menimbulkan jatuhnya korban jiwa, harta benda, infrastruktur dan kerusakan alam. Memperhatikan jenis potensi bahaya erupsi Merapi yang dapat mengancam keselamatan jiwa, maka disusunlah Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Desa Balerante Kecamatan Kemalang termasuk wilayah KRB III.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten merencanakan kebijakan relokasi warga Desa Balerante, supaya jika terjadi erupsi di kemudian hari, tidak menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda lagi. Namun tanggapan warga desa terhadap rencana relokasi adalah menolak dengan berbagai alasan. Alasan *internal* maupun *eksternal* mempengaruhi tanggapan warga terhadap rencana kebijakan relokasi. Penolakan sebagian besar warga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan rencana kebijakan relokasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, rumusan masalah yang dapat diambil, yaitu :

1. Faktor apa yang menjadi hambatan terhadap rencana relokasi?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menanggulangi permasalahan relokasi?

C. Batasan Masalah

Relokasi yang dimaksud adalah relokasi yang sedang dilaksanakan di Desa Balerante Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Kegiatan relokasi

sebagai wujud program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Merapi Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan terhadap rencana relokasi.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menanggulangi permasalahan relokasi yang terjadi.

Kegunaan Penelitian :

1. Memberikan gambaran kepada pengambil kebijakan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten terkait sikap warga yang menolak relokasi.
2. Memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran dalam hal penanganan permasalahan relokasi di Kawasan Rawan Bencana.
3. Menambah kajian ilmu pengetahuan baru tentang faktor - faktor yang menjadi hambatan dan penanggulangan terhadap permasalahan relokasi serta upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menanggulangi permasalahan relokasi.

E. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, karena sudah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat perbedaan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Perbedaan
1	Arief S. dan Eko B. 2011	Relokasi Pascabencana Erupsi Merapi 2010 : sikap warga dan permasalahan pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap warga terhadap kebijakan relokasi 2. Bagaimana permasalahan pertanahan yang muncul di lokasi bencana pasca erupsi Merapi 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat lokasi Kabupaten Sleman 2. Rencana tempat relokasi di Kabupaten Sleman di tanah TKD diperbolehkan oleh Sultan DIY 3. Konsentrasi pemerintah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman terpecah menjadi beberapa lokasi karena banyak desa yang terkena bencana
2	Ilham Adha Indradeka 2012	Relokasi Warga Pasca Erupsi Merapi 2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apa yang menjadi hambatan terhadap rencana relokasi. 2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menanggulangi permasalahan relokasi 	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat lokasi Kabupaten Klaten 2. Rencana tempat relokasi di Kabupaten Klaten di tanah bengkok aparatur desa dan tidak diperbolehkan oleh Gubernur Jawa Tengah 3. Konsentrasi pemerintah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten terfokus pada satu desa sehingga penanganan bencana lebih optimal dan terfokus.

Sumber Data : Penelitian Arief Syaifullah dan Eko Budi Wahyono dalam Lingkar Belajar Reforma Agraria (LIBRA) 2010.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menjadi hambatan terhadap rencana relokasi dipengaruhi oleh faktor *intern* dan faktor *extern*. Faktor *intern* meliputi: (a) Tanah yang diberikan untuk relokasi tidak sepadan dengan luas tanah sebelumnya. (b) Tanggung jawab aparaturnya desa. (c) Dampak sosial yang timbul di Desa Balerante. (d) Adaptasi warga Desa Balerante yang tinggi terhadap lingkungan Gunung Merapi. (e) Ikatan batin pemilik dengan tanah yang dimiliki. (f) Khawatir kehilangan kepemilikan tanah. (g) Ketidakpercayaan warga mengenai keamanan rencana tempat relokasi di Dusun Tegalweru. (h) Rencana tempat relokasi yang jauh dari permukiman asal. (i) Serta adanya adat istiadat *pekewoh*, sedangkan faktor *extern*, meliputi: (a) Otoritas pemerintah terhadap warga terkait penanggulangan bencana. (b) Terbenturnya rencana tempat relokasi yang diminta warga dengan Perda Kabupaten Klaten No. 11 Tahun 2011. (c) Tanggapan warga yang keliru terkait slogan *living harmony with disaster*.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menanggulangi permasalahan relokasi, yaitu: (a) Merubah kebijakan awal berupa pengambilan tanah warga menjadikan tanah tetap milik warga.

- (b) Diselenggarakannya sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada warga Desa Balerante tentang arti bahaya erupsi Merapi.
- (c) Pelaksanaan musyawarah antara BPBD Kabupaten Klaten dengan warga Desa Balerante mengenai rencana tempat relokasi.
- (d) Pembuatan peraturan mengenai bencana erupsi Merapi secara partisipatif.
- (e) Sosialisasi dan pelatihan tanggap darurat, pembangunan sarana dan prasarana tanggap darurat.

B. Saran

1. Pemerintah memberikan kejelasan terkait relokasi dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga mengurangi rasa khawatir warga akan kehilangan kehidupan dan kepemilikan di masa akan datang.
2. Keberhasilan rencana relokasi harus didukung dengan transparansi informasi terkait jaminan kehidupan di tempat relokasi.
3. Hendaknya dilakukan relokasi berbasis komunitas di Dusun Tegalweru dengan di lengkapi sarana dan prasarana transportasi serta legalisasi aset, karena menurut peneliti relokasi tersebut dapat meminimalisir faktor *intern* dan *extern* penolakan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Abu Vulkanik Tenggelamkan Enam Dukuh Di Balerante Klaten - Klatenkita.com. http://klatenkita.com/72_Abu-Vulkanik-Tenggelamkan-Enam-Dukuh-Di-Balerante-Klaten.html diunduh pada tanggal 21 Januari 2012 pada pukul 22.52 WIB.
- Arief S. dan Eko B. Relokasi Pascabencana Erupsi Merapi 2010 : sikap warga dan permasalahan pertanahan, ada beberapa alasan mengapa warga menolak relokasi.
- Badan Geologi – KESDM – Profil Badan Geologi http://www.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 diunduh pada tanggal 22 Januari 2012 pada pukul 18.11 WIB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana – Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penanggulangan_Bencana diunduh pada tanggal 29 Desember 2011 pada pukul 21.43 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2011. Kecamatan Kemalang Dalam Angka Tahun 2011.
- BAPPENAS – BNPB. 2011. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Merapi Di Provinsi DI. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Desa Balerante. 2011. RPJMDes Desa Balerante Tahun 2011-2015.
- Gagne (1974) dalam Komunitas Untuk Teman-Teman Psikologi Unnes. 1 <http://psikologi-unnes.blogspot.com/2008/08/pengertian-sikap-dan-perilaku.html>. Diunduh pada tanggal 17 Januari 2012 pada pukul 10.26 WIB.
- Geografi Earth Education – Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteranian <http://g3oearth.blogspot.com/2010/11/sirkum-pasifik-dan-sirkum-mediteranian.html> diunduh pada tanggal 22 Januari 2012 pada pukul 18.00 WIB.
- Indonesia - Wikipedia <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> diunduh pada tanggal 15 Januari 2012 pada pukul 12.23 WIB.

Kabupaten Klaten – Klaten Online <http://klatenonline.com/klaten/kabupaten-klaten.htm> diunduh pada tanggal 28 desember 2011 pukul 23.36 WIB.

Kebijakan Publik <http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-tentang-pemerintah-daerah.html> diunduh pada tanggal 14 Januari 2012 pada pukul 01.52 WIB.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah.

http://www.ekon.go.id/media/documents/2011/10/04/k/e/keppres_16_-_2011.pdf diunduh pada tanggal 2 Februari 2012 pada pukul 13.37 WIB.

Moleong, Lexy J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan 25. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Peraturan KBPN Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana <http://www.ndaru.net/wp-content/uploads/PENANGANAN-BENCANA-DAN-PENGEMBALIAN-HAK-HAK-MASYAR.pdf> diunduh pada tanggal 10 Oktober 2010 pada pukul 16.27 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/69/1354.bpkp> diunduh pada tanggal 21 Oktober 2009 pada pukul 11.39 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=1955&filename=PP%2021%20Tahun%202008.pdf diunduh pada tanggal 17 Desember 2011 pada pukul 12.55 WIB.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

<http://www.klatenkab.go.id/perundangan.shtml> diunduh pada tanggal 10 Desember 2011 pada pukul 20.39 WIB.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/178.pdf> diunduh pada tanggal 21 Oktober 2009 pada pukul 11.44 WIB.

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi dan Area Terdampak Letusan 2010 – Geospasial BNPB <http://geospasial.bnpb.go.id/2011/05/04/peta->

[kawasan-rawan-bencana-gunung-merapi-dan-area-terdampak-letusan-2010/](#) diunduh pada tanggal 22 Januari 2012 pada pukul 23.32 WIB.

Peta Lokasi dan Jumlah Pengungsi Letusan G.Api Merapi di Kab. Klaten – Geospasial BNPB <http://geospasial.bnpb.go.id/2010/11/03/peta-lokasi-dan-jumlah-pengungsi-letusan-g-api-merapi-di-kab-sleman-3/> diunduh pada tanggal 17 Desember 2011 pada pukul 2.44 WIB.

Peta Rekapitulasi Korban, Pengungsi dan Kerusakan Akibat Letusan Gunung Merapi, sumber Pusdalops BNPB. BAPPENAS <http://geospasial.bnpb.go.id/2010/11/23/peta-rekapitulasi-per-kabupaten-jumlah-korban-pengungsi-dan-kerusakan-akibat-letusan-gunungapi-merapi-23-nov-2010-2/> diunduh pada tanggal 20 Desember 2011 pada pukul 12.35 WIB.

Promo Jateng - Biro Humas Provinsi Jawa Tengah <http://www.promojateng-pemprovjateng.com/ambildaerah.php?kota=Klaten> diunduh pada tanggal 29 Desember 2011 pada pukul 20.03 WIB.

Ramli, Soehatman. 2010. [Pedoman Praktis Manajemen Bencana](#). PT. Dian Rakyat. Jakarta.

Sabari Yunus, Hadi. 2005. [Struktur Tata Ruang Kota](#). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Satkorlak PB Merapi Klaten Siapkan 2 Lokasi Pengungsian - Solopos.com <http://www.solopos.com/2010/klaten/satkorlak-pb-merapi-klaten-siapkan-2-lokasi-pengungsian-68649> pada tanggal 16 Januari 2012 pada pukul 10.15 WIB.

Sudibyakto, Prof. 2011. [Manajemen Bencana Di Indonesia Kemana?](#). Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Suit Yusuf dan Almasdi. 1996. [Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia](#). Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sumardjono, Maria SW. Prof. Dr. SH. MCL. MPA. 2007. [Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi](#). Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Tetap Tolak Pindah, Ada Warga Merapi Tak Terpengaruh Iming-Iming Bantuan Tanah – Republika

<http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/09/22/lrwybt-tetap-tolak-pindah-ada-warga-merapi-tak-terpengaruh-imingiming-bantuan-tanah> diunduh pada tanggal 11 Desember 2011 pada pukul 9.38 WIB.

Undang-Undang Dasar 1945

<http://www.taspen.com/files/humas/UUD%201945.pdf> diunduh pada tanggal 5 Desember 2011 pada pukul 22.08 WIB.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Prof. Boedi Harsono. 2006. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

http://www.smeccda.com/Files/infosmeccda/uu_permen/UU_32_2004.pdf diunduh pada tanggal 10 Desember 2011 pada pukul 20.41 WIB.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

http://www.gitews.org/tsunami-kit/en/E6/further_resources/national_level/undang_undang/UU%2024-2007_Penanggulangan%20Bencana.pdf diunduh pada tanggal 17 Desember 2011 pada pukul 12.51 WIB.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Warga Merapi Digemparkan Isu Pengambilalihan Lahan - Timlo. Net
<http://sosial.timlo.net/baca/8756/warga-merapi-digemparkan-isu-pengambilalihan-lahan> diunduh pada tanggal 11 Desember 2011 pada pukul 9.41 WIB.